

PERUBAHAN STRUKTUR AGRARIA, KEMISKINAN, DAN GERAK PENDUDUK: SEBUAH TINJAUAN HISTORIS

Rural Poverty, Population Mobility, And Agrarian Change: A Historical Overview

Martua Sihaloho^{*)}, Ekawati Sri Wahyuni, Rilus A. Kinseng, dan Sediono MP. Tjondronegoro

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB

^{*)} E-mail: m_sihaloho@yahoo.com

ABSTRACT

To overcome some economic difficulties, especially poverty, most poor people in the rural area decide to adopt a migration strategy (especially going to foreign countries). The decision to become international migrants contributes to the national economy (foreign exchange) at the macro level and their nuclear family (remittance) at the micro level. The remittance or cash money, in turn, enables them to meet their needs and even accumulate some assets (e.g. land and house) to be used as capital, resulting in a transformation of local agrarian structure. Some studies showed that the welfare of migrants' families has increased significantly. Such an improved welfare of poor rural families has made rural community more dynamic in the vertical social mobility, including the efforts to extend their contract and motivate family members and the community to become international migrants (theory of cumulative causes, poverty-agrarian proposition, and poverty-migration proposition). This study has four initial hypotheses, namely: (1) change in agrarian structure affects poverty condition, (2) poverty (agrarian) affects population mobility, (3) population mobility (resulted remittance) affects agrarian structure, and (4) structural change in agraria causes new poverty. The diverse management and utilization of agrarian resources (poverty condition and the choice of population mobility —international migration) imply changes in the local agrarian structure which in turn produces new poverty and new agrarian classes.

Keywords: agrarian structure, poverty, population mobility, persistence

ABSTRAK

Masyarakat miskin pedesaan pada akhirnya memilih menjadi pelaku migran dalam upaya mengatasi sejumlah kesulitan ekonomi (mengatasi masalah kemiskinan) yang dihadapinya. Pelaku migrasi mengambil keputusan dan berangkat menjadi migran pada akhirnya berkontribusi secara nasional (devisa negara) di aras makro dan terlebih di aras mikro (keluarga inti) pelaku migran-berupa remiten. Hasil remiten (khususnya ekonomi-uang) pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan bahkan mampu mengakumulasi asset (misal lahan dan rumah) untuk dijadikan modal bahkan ke arah perubahan struktur agraria lokal. Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan peningkatan kesejahteraan keluarga pelaku migrasi. Perubahan kesejahteraan masyarakat miskin ini menjadi makin baik pada akhirnya mendinamisasi masyarakat pedesaan misalnya mobilitas sosial vertikal naik, termasuk upaya-upaya untuk melanjutkan kontrak menjadi pelaku migran, mendorong anggota keluarga dan komunitas menjadi pelaku migran (teori penyebab kumulatif, proposisi kemiskinan-agraria, proposisi kemiskinan-migrasi). Tiga hipotesis pengarah sebagai gagasan awal adalah (1) perubahan struktur agraria mempengaruhi kondisi kemiskinan; (2) kemiskinan (agraria) mempengaruhi laju gerak penduduk; (3) gerak penduduk (menghasilkan remiten) mempengaruhi perubahan struktur agraria, dan (4) perubahan struktur agraria menghasilkan kemiskinan baru. Ragam implikasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria (kondisi kemiskinan dan pilihan gerak penduduk-migrasi internasional) berimplikasi pada perubahan struktur agraria dan selanjutnya menghasilkan kemiskinan baru dan golongan kelas baru.

Kata Kunci: stuktur agraria, kemiskinan, gerak penduduk, persisten

PENDAHULUAN

Program-program pembangunan yang diimplementasikan di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan semua pihak. Dengan demikian, salah satu hasil implementasi program-program pembangunan di Indonesia dapat mengurangi jumlah penduduk miskin atau dengan kata lain dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin. Akan tetapi, dalam proses pencapaian tujuan tersebut, adakalanya juga memberi dampak yang berbeda (kurang menguntungkan), terutama bagi pihak-pihak tertentu, misalnya kelompok-kelompok rentan (dalam hal ini secara ekonomi tergolong miskin).

Kemiskinan merupakan salah satu dari beberapa permasalahan yang saat ini dihadapi bangsa Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan ini, sejumlah pihak (terutama Pemerintah) mengimplementasikan beragam program pembangunan,

termasuk hubungannya dengan mengelola dan memanfaatkan sumberdaya agraria. Paling tidak ada dua muara masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria yaitu konflik sosial dan kerusakan sumberdaya agraria. Konflik sosial dapat terjadi ketika suatu kelompok, komunitas, atau masyarakat kehilangan akses dan kontrol terhadap suatu sumberdaya agraria. Selanjutnya, dalam kondisi tersebut (kehilangan/ketidakadilan akses dan kontrol), dapat memicu terjadinya konflik sosial dan perilaku kelompok, komunitas, atau masyarakat tersebut ke arah perilaku yang tidak ramah lingkungan.

Permasalahan-permasalahan di atas sangat berhubungan dengan jumlah penduduk. Di satu sisi, penduduk terus bertambah, di sisi lain luasan lahan (misal lahan sawah di pedesaan) relatif tetap/tidak bertambah, bahkan makin berkurang, yang ditunjukkan tingginya rasio manusia terhadap lahan. Tingginya rasio manusia-lahan dan ketidakadilan dalam akses dan kontrol yang terjadi, berimplikasi pada

peningkatan jumlah buruh tani (tuna kisma) dan makin meningkatnya jumlah penduduk miskin pedesaan. Implikasi selanjutnya adalah berdampak pada makin sulitnya buruh tani memiliki peluang bekerja baik sebagai buruh tani, penyewa/penggarap di pedesaan (bahkan di desanya sendiri). Beragam dinamika akses dan kontrol, ketidakadilan, dan kemiskinan di atas mendorong sejumlah orang melakukan migrasi, baik permanen maupun non permanen. Dinamika fenomena migrasi dan kemiskinan ini sangat terkait dengan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, serta aspek lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung.

Hasil sensus penduduk tahun 2010 (SP 2010) menunjukkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 237.641.326 jiwa dengan reit pertumbuhan penduduk sebesar 1.49% per tahun¹. Dari jumlah 241.185.000 orang penduduk Indonesia pada tahun 2011, fakta empiris menunjukkan jumlah penduduk miskin adalah sebesar 30.02 juta jiwa (12.49%), dimana penduduk miskin di desa lebih besar jumlahnya dibandingkan di kota² (BPS 2011³). Demikian juga dengan data tahun 2012, jumlah penduduk miskin mencapai 28.59 juta orang (11.66 persen)⁴. Data terbaru (Maret 2015) menunjukkan, jumlah penduduk miskin mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), dengan persentase penduduk miskin di pedesaan meningkat menjadi 14,2 persen⁵. Selanjutnya, konflik sosial yang terjadi di Indonesia juga termasuk tinggi dan laju konversi lahan pertanian di Indonesia, khususnya di Jawa mencapai 75 sampai 100 persen (Sihaloho *et al.* 2007). Demikian juga dengan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh beragam pola pemanfaatan khususnya yang sifatnya eksploitasi para pihak, yang berakhir ketidakadilan agraria.

Respon terhadap permasalahan hidup (mengatasi kemiskinan) dan juga tujuan-tujuan positif lainnya mendorong masyarakat Indonesia melakukan gerak penduduk (permanen, non permanen-baik internal maupun eksternal), sebagaimana telah dikemukakan di atas. Demikian juga dengan program pembangunan di Indonesia telah meningkatkan mobilitas penduduk Indonesia (Wahyuni 2000). Hasil SP 2010 mencatat 5.396.419 penduduk atau 2,5 persen penduduk merupakan migran masuk risen antar provinsi. Persentase migran risen di daerah perkotaan tiga kali lipat lebih besar migran risen di daerah pedesaan, masing-masing sebesar 3,8 dan 1,2 persen. Demikian juga dengan menurut gender, jumlah migran laki-laki lebih banyak daripada migran perempuan, 2.830.114 berbanding 2.566.305 orang. Seks rasio migran risen adalah 110,3; data tahun 2000 seks rasio adalah 111. Dalam konteks migrasi, umumnya dilakukan oleh laki-laki untuk pekerjaan dan sekolah. Selanjutnya, jumlah pelaku migrasi dalam hal ini, desa-desa, desa-kota, dan kota-kota (masih dalam satu propinsi) relatif tidak terdata dengan baik yang jumlahnya

1 Dengan reit pertumbuhan penduduk 1.49% per tahun, maka jumlah penduduk Indonesia tahun 2011 adalah 241.185.000 orang; atau bertambah sekitar 3.5 juta orang per tahun.

2 Tahun 1961 (hasil SP1961, 1971, 1980, 1990), hingga tahun 2000 (hasil SP2000) jumlah penduduk di daerah perkotaan jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk di daerah pedesaan. Akan tetapi, sejak tahun 2010 (hasil SP2010) jumlah penduduk di daerah perkotaan sudah seimbang dengan di daerah pedesaan. Yang belum seimbang hingga saat ini adalah jumlah penduduk di Jawa (57%) dan luar Jawa 43%. Dalam hal ini, makin mendekati seimbang khususnya mulai tahun 2000 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama tahun 1961 (85% di Jawa).

3 Sumber: http://www.bps.go.id/booklet/Boklet%20November_2011.pdf

4 Berita Resmi Statistik No. 06/01/Th.XVI, 2 Januari 2013. Berita resmi ini juga menunjukkan bahwa indeks kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan mengalami kenaikan. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar.

5 Sumber: <http://bps.go.id/brs/view/1158/>

jauh lebih besar dibandingkan migrasi internasional dan internal (antar propinsi) sebagaimana ditunjukkan dalam hasil sensus penduduk.

Jumlah pelaku migrasi internal juga jauh lebih banyak dibandingkan pelaku migrasi internasional. Fenomena migrasi menunjukkan jumlah penduduk yang merupakan migran risen terus meningkat dari waktu ke waktu. Demikian juga dengan pelaku migrasi internasional. Jumlah pelaku migrasi internasional hingga tahun 2012 adalah tercatat sebanyak 3.998.592 orang yang tersebar di seluruh dunia. Adapun rinciannya yakni Saudi Arabia (1.427.928), Malaysia (1.049.325) Taiwan (381.588), Singapore (228.875), United Emirate Arab (220.820), Hong Kong (214.476), Kuwait (106.594), dan sejumlah Negara lainnya.⁶

Realitas kemiskinan yang dihadapi sejumlah rumah tangga di Indonesia pada akhirnya mendorong pilihan rumah tangga miskin (dalam hal ini misalnya anggota rumahtangga) untuk mencari sumber nafkah yang lain. Misalnya, pilihan menjadi tenaga kerja Indonesia/TKI⁷ ke luar negeri (migrasi internasional). Demikian juga gerak penduduk yang sifatnya non permanen maupun permanen yaitu menjadi pekerja di sektor formal dan informal, baik dalam desa, antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten/kota, bahkan antar propinsi. Untuk wilayah-wilayah tertentu antar pulau, khususnya di wilayah pulau-pulau kecil.

Upaya mengatasi masalah ini, yang relatif memerlukan waktu dan biaya yang mahal, baik mengatasi konflik sosial, kerusakan lingkungan, maupun kemiskinan dan atau ketiganya sekaligus. Dalam konteks tulisan ini berupaya mendeskripsikan dan menganalisis yang memuara pada hasil kajian dalam rangka mengantisipasi, menghindari, dan menekan munculnya kompleksitas permasalahan kemiskinan (khususnya dalam hubungan sosial-agraria) yang dipicu oleh pola pemanfaatan agraria yang tidak bijaksana (termasuk beragam implikasi gerak penduduk dan perubahan struktur agraria).

Tujuan penulisan ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis hubungan antara perubahan struktur agraria, kemiskinan, dan gerak penduduk secara historis/kajian kritis isu-isu terkini. Selanjutnya metode penulisannya adalah berupa review literatur, baik teori-teori maupun studi-studi empiris/hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan realitas kemiskinan, gerak penduduk, dan aksesibilitas terhadap sumberdaya agraria. Hasil review tersebut, diulas/dianalisis dan disimpulkan menjadi pertanyaan-pertanyaan dan hipotesis-hipotesis yang akan dijawab melalui penelitian.

TINJAUAN HISTORIS

Kerangka teoritik

Struktur agraria dan perubahan struktur agraria

Struktur agraria pada dasarnya menjelaskan bagaimana struktur akses pihak-pihak yang terkait dengan sumberdaya agraria. Dengan kata lain, hubungan-hubungan sosio-agraria dapat menjelaskan bagaimana struktur agraria suatu masyarakat. Selanjutnya pada aras yang lebih luas struktur agraria merupakan gambaran dari struktur masyarakat.

6 Sumber: <http://www.bnp2tki.go.id/statistik-penempatan/6756-penempatan-per-tahun-per-negara-2006-2012.htm>, Diakses 22 April 2012.

7 Umumnya dianggap didominasi oleh alasan ekonomi untuk peningkatan status ekonomi dan kualitas hidup.

Upaya memahami struktur agraria dapat berangkat dari tesis Jurgen Habermas tentang dua dimensi tindakan manusia yaitu kerja (tindakan teknis terhadap obyek) dan interaksi atau komunikasi (tindakan sosial terhadap subyek) (Habermas 1990; Hardiman 1990). Dari dua tesis ini dapat dikatakan bahwa tindakan manusia dalam bidang keagrariaan juga mengandung dimensi-dimensi kerja dan interaksi/komunikasi. Secara deduktif, dua proposisi dasar analisis agraria sebagai berikut: *pertama*, ketiga subyek agraria memiliki hubungan teknis dengan obyek agraria dalam bentuk kerja pemanfaatan berdasar hak penguasaan (*land tenure*) tertentu; *kedua*, ketiga subyek agraria satu sama lain berhubungan atau berinteraksi secara sosial dalam rangka penguasaan dan pemanfaatan obyek agraria tertentu. Merujuk pada Wiradi (1984) proposisi pertama merumuskan hubungan antara manusia dengan sumber agraria sedangkan proposisi kedua merumuskan hubungan antara manusia dan manusia.

Hubungan-hubungan di atas merupakan gambaran bagaimana antar pihak pemanfaat memiliki hubungan teknis dengan sumberdaya agraria, namun sekaligus menjadi ‘dinamika baru’ dalam hubungan diantara subyek agraria. Dinamika inilah yang kemudian menjadi ‘pembeda’ pemanfaatan/penggunaan diantara para pemilikinya. Namun demikian, hubungan sosial dan interaksi sosial diantara subyek-subyek agraria bersifat dua arah. Dasar hubungannya adalah hak penguasaan obyek atau sumber agraria yang dipunyai oleh masing-masing subyek. Perbedaan antar subyek dalam hak penguasaan sumber agraria itu menghasilkan suatu tatanan sosial yang dikenal sebagai struktur (sosial) agraria. Dengan demikian struktur agraria pada dasarnya menunjuk pada hubungan antar berbagai status sosial menurut penguasaan sumber-sumber agraria. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan “pemilik dengan pemilik”, “pemilik dengan pembagi-hasil”, “pemilik dengan penyewa”, “pemilik dengan pemakai”, dan lain-lain. Contoh lain yang menggambarkan adanya perbedaan akses individu/ rumah tangga terhadap sumber agraria adalah adanya sistem maro, mertelu, rapat dan bahkan merlima. Pola hubungan ini sudah ada sejak tahun 1931 (Sceltema, 1985).

Cara produksi dapat menggambarkan tipe struktur agraria. Dengan kata lain, cara produksi juga ditentukan oleh siapa sumberdaya agraria tersebut dikuasai termasuk dalam hal pengambilan keputusan. Tipe-tipe cara produksi yang mungkin eksis dalam suatu masyarakat, dengan salah satu diantaranya tampil dominan, adalah (Jacoby 1971; Wiradi 2000):

- (a) tipe naturalisme: sumber agraria dikuasai oleh komunitas lokal, misalnya komunitas adat, secara kolektif;
- (b) tipe feodalisme: sumber agraria dikuasai oleh minoritas “tuan tanah” yang biasanya juga merupakan “patron politik”;
- (c) tipe kapitalisme: sumber agraria dikuasai oleh non-penggarap yang merupakan perusahaan kapitalis;
- (d) tipe sosialisme: sumber agraria dikuasai oleh Negara atas nama kelompok pekerja; dan
- (e) tipe populisme/neo-populisme: sumber agraria dikuasai oleh keluarga/rumah tangga pengguna.

Tipe-tipe ideal tersebut di atas tidak mungkin ditemukan secara mutual eksklusif dalam suatu masyarakat karena tidak ada suatu masyarakat dengan struktur agraria yang murni naturalis, feodalis, kapitalis, sosialis, ataupun populis/neo-populis. Hal yang lebih realistis adalah dua atau lebih tipe struktur agraria sama-sama eksis dalam suatu masyarakat, tetapi dengan dominasi salah satu tipe atas tipe-tipe lainnya (yang menjadi marginal).

Memahami struktur agraria dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat pedesaan maka konsep struktur agraria tidak lepas dari pola penguasaan sumberdaya agraria (tanah), pola nafkah agraria, pola hubungan produksi agraria, distribusi aset agraria dan pola formasi asset/kapital, sebagaimana dikemukakan di atas. Pola penguasaan lahan menggambarkan struktur akses subyek agraria terhadap sumberdaya agraria. Pola penguasaan ini juga berhubungan dengan bagaimana hubungan subyek-subyek agraria dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya agraria yang ada.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria secara khusus terkait dengan kebutuhan subyek agraria. Dengan kata lain berhubungan dengan sumber mata pencaharian, yang dalam hal ini lebih dipahami sebagai sumber mata pencaharian utama/pokok. Dengan demikian, beberapa sumber mata pencaharian yang berhubungan dengan pemanfaatan sumberdaya agraria adalah pendapatan dari *farming*, *non-farming* dan *off non-farming*. Pola nafkah agraria tidak selalu dipahami dari bagaimana sumberdaya agraria dimanfaatkan langsung, tetapi akibat dari tidak akses dan pengelolaan tidak langsung juga dapat dipahami sebagai pola nafkah agraria.

Selanjutnya hubungan produksi agraria menggambarkan bagaimana distribusi aset agraria dan juga pola formasi *asset* atau *capital*. Dalam hal ini, penguasaan terhadap sumberdaya agraria yang luas berimplikasi dengan penguasaan kapital lain seperti uang, teknologi, dan juga akses terhadap kekuasaan. Hal ini juga digambarkan dengan ciri masyarakat agraria dimana salah satu dasar pelapisan sosial masyarakat adalah kepemilikan terhadap sumberdaya agraria (tanah).

Ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah yang tidak seimbang memerlukan suatu perbaikan. Adapun dasar pertimbangannya adalah struktur agraria yang timpang akan memberikan akses sangat terbuka bagi “lapisan minoritas” untuk menguasai dan mengusahakan lahan namun relatif tertutup bagi “lapisan mayoritas” untuk menguasai dan mengusahakan lahan.

Gerak Penduduk dan Tipologi Gerak Penduduk

Istilah umum bagi gerak penduduk dalam demografi adalah *population mobility* atau secara khusus *teritorial mobility* yang biasanya mengandung makna gerak spasial, fisik dan geografis (Rusli 2012) yang terdiri dari dimensi gerak penduduk permanen dan non permanen. Migrasi merupakan dimensi gerak penduduk permanen sedangkan dimensi gerak penduduk non permanen terdiri atas sirkulasi dan komutasi (Rusli 2012).

Gerak penduduk adalah suatu dinamika kependudukan yang mempengaruhi persebaran penduduk. Bagi daerah-daerah pedesaan minus atau daerah-daerah tertinggal (*rural depressed area*), gerak penduduk keluar merupakan salah satu cara pemecahan masalah ekonomi yang dihadapi oleh banyak rumah tangga. Berfungsi sebagai sarana pemerataan pendapatan antara daerah maju/daerah berkembang dan daerah minus/daerah tertinggal (Rusli 2012).

Migrasi adalah suatu bentuk gerak penduduk geografis, spasial atau teritorial antara unit-unit geografis yang melibatkan perubahan tempat tinggal yaitu dari tempat asal ke tempat tujuan. Gerak penduduk permanen (*permanent movement*): migrasi, berciri perpindahan tempat tinggal (domisili, pelaku gerak penduduk/migran secara permanen). Migrasi keluar tenaga kerja muda dari daerah pertanian pedesaan dapat berakibat berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian. Lebih lanjut, misalnya memerlukan substitusi dengan tenaga kerja mesin. Gerak keluar tenaga kerja mungkin juga berfungsi dalam memecahkan masalah pengangguran yang terdapat

di daerah pedesaan. Gerak tenaga kerja berhubungan erat dengan peluang bekerja dan tingkat upah/tingkat penghasilan. Masuknya beragam informasi melalui para pelaku gerak penduduk akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat pedesaan.

Teori gerak penduduk yang umum adalah teori dorong-tarik (*push-pull theory*). Faktor pendorong dalam hal ini adalah alasan-alasan meninggalkan daerah asal. Selanjutnya, faktor penarik adalah alasan-alasan memilih daerah tujuan. Kelemahan teori ini adalah karena tidak memperhitungkan berbagai faktor pribadi, sosial, dan kebudayaan (Rusli 2012). Teori yang kedua adalah teori kesempatan antara. Menurut teori ini, jumlah orang yang pergi ke suatu jarak tertentu berbanding langsung dengan jumlah kesempatan pada jarak tersebut dan berbanding terbalik dengan jumlah kesempatan antara. Kelemahan teori ini adalah tidak memperhitungkan berbagai faktor pribadi, sosial, dan kebudayaan (Rusli 2012).

Salah satu pilihan melakukan migrasi khususnya pada aras mikro adalah kondisi ekonomi individu atau keluarga (secara khusus). Dalam konteks tulisan ini, pilihan ini juga diakibatkan kondisi kemiskinan (agraria) yang juga dialami individu, keluarga, bahkan komunitas (daerah yang dikenal sebagai "pengirim" pelaku migrasi keluar, misalnya migrasi internasional.

Migrasi Internasional

Migrasi internasional adalah salah satu gerak penduduk yang tergolong migrasi eksternal. Berikut adalah teori migrasi internasional yang dapat menjelaskan fenomena migrasi internasional secara komprehensif. Menurut Massey *et al.* (1993), lima pendekatan utama yang dapat digunakan untuk memahami migrasi internasional adalah (1) ekonomi neo-klasik makro, (2) ekonomi neo-klasik mikro, (3) teori ekonomi baru, (4) teori pasar tenaga kerja, dan (5) teori sistem dunia.

Teori ekonomi neo-klasik (makro), menekankan bahwa perbedaan dalam aspek geografis dari sisi penawaran dan permintaan tenaga kerja di daerah asal dan tujuan merupakan faktor utama yang mendorong keputusan bermigrasi. Salah satu asumsi teori ini adalah bahwa migrasi internasional tidak akan terjadi jika tanpa adanya faktor di atas, dan bahwa penghilangan faktor-faktor di atas akan menghentikan pergerakan internasional, dan bahwa pasar tenaga kerja (dan bukan pasar yang lain) merupakan mekanisme utama pemicu migrasi. Intervensi kebijakan pemerintah mempengaruhi migrasi dengan mengatur atau mempengaruhi pasar tenaga kerja di negara asal dan tujuan. Berbeda dengan aras makro, teori ekonomi neo-klasik (mikro), memfokuskan pada tingkat individu sebagai aktor rasional yang membuat keputusan bermigrasi berdasarkan perhitungan manfaat dan biaya yang mengindikasikan tingkat pengembalian yang positif dari perpindahan itu. Dengan demikian, pada pendekatan ini, karakteristik sumberdaya manusia yang berpotensi meningkatkan manfaat migrasi adalah faktor individu, sosial, atau teknologi yang menurunkan biaya, juga akan mendorong peningkatan migrasi. Perbedaan dalam pendapatan dan tingkat upah pekerja merupakan variabel kunci dan pemerintah mempengaruhi migrasi melalui kebijakan (misalnya melalui proses pembangunan yang meningkatkan pendapatan di daerah asal, menurunkan kemungkinan mendapat pekerjaan di daerah tujuan atau meningkatkan biaya keberangkatan).

Teori ekonomi baru memandang bahwa migrasi sebagai sebuah strategi keluarga (misalnya kelompok maupun komunitas) untuk mendiversifikasikan sumber pendapatan,

menurunkan resiko terhadap rumahtangga, dan mengatasi hambatan terhadap keterbatasan kredit dan modal. Dalam model ini, migrasi internasional merupakan alat untuk mengkompensasi ketidak-adaan atau kegagalan suatu jenis pasar tertentu di negara berkembang, misalnya pasar asuransi pertanian, asuransi tenaga kerja atau pasar modal.

Teori pasar tenaga kerja menekankan bahwa permintaan terhadap pekerja kelas rendahan (*low-level workers*) di negara yang lebih maju merupakan faktor kritikal dalam membentuk migrasi internasional. Guna menghindari inflasi struktural yang akan terjadi akibat meningkatnya biaya bagi pekerja pemula dari tuan rumah dan untuk menjaga agar tenaga kerja tetap merupakan faktor produksi, pemberi kerja akan mencari pekerja migran yang mau menerima gaji rendah. Dalam model ini, migrasi internasional merupakan fenomena *demand-based* dan diinisiasi oleh kebijakan rekrutmen dari pemberi kerja atau kebijakan pemerintah di negara tujuan. Perbedaan upah antara negara tujuan dengan negara asal bukanlah syarat perlu terjadinya migrasi. Pilihan kebijakan untuk mempengaruhi migrasi sangat terbatas-perubahan dalam organisasi ekonomi di negara tujuan.

Fokus dari teori sistem dunia adalah pada struktur pasar dunia merupakan penetrasi hubungan ekonomi kapitalis ke dalam daerah periferi, sebuah masyarakat non-kapitalis, yang terjadi melalui berbagai tindakan pemerintahan neokolonial, perusahaan multinasional, dan juga pihak elit nasional. Migrasi internasional terjadi setelah tanah, bahan mentah dan pekerja di daerah asal masuk ke dalam pasar ekonomi dunia dan sistem tradisional terganggu. Hubungan transportasi, komunikasi, budaya, dan ideologi yang menyertai globalisasi kemudian turut memfasilitasi migrasi internasional.

Proses proses migrasi internasional berlaku berkelanjutan menumbuhkan berbagai teori baru yang terkait yaitu teori jaringan, teori kelembagaan, dan teori penyebab kumulatif. Teori jaringan menekankan bahwa jaringan migrasi berfungsi untuk mengurangi biaya dan resiko migrasi internasional dan karenanya meningkatkan peluang migrasi. Pengembangan jaringan seperti ini sering difasilitasi oleh kebijakan pemerintah terhadap keluarga dan sekali dijalankan. Jaringan migrasi ini dapat membangun aliran internasional yang relatif tidak sensitif terhadap intervensi kebijakan.

Migrasi internasional menurut teori institusional terkait dengan organisasi swasta dan organisasi terbangun untuk mendukung dan mempertahankan aliran migrasi. Kelembagaan inilah menyediakan transportasi, perekrutan para tenaga kerja, perumahan, pelayanan hukum, dan sebagainya. Selanjutnya, teori penyebab kumulatif berpandangan bahwa konteks sosial mempengaruhi keputusan migrasi, adanya gelombang migrasi menciptakan umpan balik yang menyebabkan arus migrasi berlangsung secara terus-menerus.

Teori Sosiologi dalam Memahami Perubahan Struktur Agraria, Kemiskinan, dan Gerak Penduduk

Teori sosiologi pertama yang digunakan dalam memahami realitas sosial yang menjadi fokus tulisan ini adalah sosiologi materialisme dari Karl Marx (sebagai *grand sociological theory*). Menurut teorisisasi Marxian, materi sebagai basis terbentuknya interaksi sosial⁸. Selanjutnya, menurut teori ini (a) Hubungan sosial produksi kapitalistik yang didalamnya mengenal *fetishism of commodities* (menghilangkan makna sumbangan buruh dalam proses nilai tambah produk/komoditi yang diperdagangkan). Dalam hubungan sosial agraria,

⁸ Gagasan dialektika yang membangun argumentasi dan cara berpikir yang kompleks.

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Distribusi Penduduk Indonesia Tahun 1971 – 2010

Wilayah	Jumlah dan Persentase (%) Penduduk menurut Tahun Sensus Penduduk				
	1971	1980	1990	2000	2010
Indonesia	118.367.850	146.776.473	179.247.783	201.241.999	237.641.326
Jawa	76.029.636 (64.23)	93.584.697 (63.76)	107.516.520 (59.98)	120.978.005 (60.12)	136.610.590 (57.49)
Luar Jawa	42.338.214 (35.77)	53.191.776 (36.24)	71.731.263 (40.02)	80.263.994 (39.88)	101.030.736 (42.51)
Perkotaan	42.338.214 (17.29)	53.191.776 (22.38)	71.731.263 (30.93)	80.263.994 (42.43)	101.030.736 (49.79)
Pedesaan	20.465.377 (82.71)	32.845.769 (77.62)	55.433.790 (69.07)	(57.57) 85.380.627	118.320.256 (50.21)
Penduduk Miskin*	(>40)	(28.5)	(15.1)	(19.1)	(13.5)

Catatan:

Prediksi Ananta dan Anwar (1994), jumlah penduduk perkotaan tahun 2015=52,60%; 2020=55,19% dan 2025: 57,30%

Keterangan: angka dalam kurung () adalah angka persentase

* = Tahun 1996, 1997, dan 1998 jumlah penduduk miskin meningkat (saat krisis); tahun 1998 jumlahnya mencapai 24,2%; untuk tahun 1961 dan 1971 (perkiraan penulis)

Sumber: SP 1971, 1980, 1990, 2000, 2010, dan BPS 2009.

peran petani mengalami sindroma fetishisme dalam produksi pertanian sehingga petani diabaikan sebagai aktor produksi; dan (b) Kelas sosial (kapitalis) yang berkonflik dengan kelas sosial [buruh] akibat kepentingan akumulasi material dan *transfer of surplus of values* dari sebuah proses produksi. Dalam memahami realitas kemiskinan, ketimpangan akses terhadap sumberdaya agraria (interaksi antara subyek-subyek) mempengaruhi pelaku migrasi melakukan strategi nafkah misalnya dengan pilihan gerak penduduk.

Menurut Boeke (1953, persentuhan budaya ekonomi, desa mengalami perubahan sosial dari tipe “moda produksi” ganda/*multiple* menjadi pra kapitalis dihadapkan dengan kapitalis. Fenomena kemiskinan di desa menjadi makin seiring dengan perubahan dari tipe “moda produksi” dari pelaku-pelaku “pengakses” sumberdaya agraria lokal.

Menurut Geertz (1984), adaptasi ekologi terhadap produksi pangan menghasilkan dua tipe sosial-kemasyarakatan yaitu masyarakat sawah yang organisasi sosial-produksinya rumit dan masyarakat *shifting cultivation* yang organisasi sosial produksinya sederhana. Dalam konteks tulisan ini tekanan kekuasaan atas penguasaan sumber-sumber agraria penting - perkebunan, mendorong masyarakat Jawa melakukan *livelihood activities* pada luasan sawah yang sempit yang selanjutnya disebut teori *shared poverty* di Jawa. Petani Jawa tidak pernah beranjak dari kemiskinan bersama, sekalipun diberikan insentif ekonomi “ala” kapitalis kepada mereka-masyarakat Jawa pada saat itu tidak sensitif harga, sehingga disebutkan sebagai perubahan sosial yang *involved* (involusi pertanian).

Respons ahli-ahli sosial dari Bogor yang selanjutnya makin dikenal dengan Mazhab Bogor⁹ terhadap realitas pembangunan di Indonesia yaitu dengan “membangun” tesis: sejatinya bentuk sistem sosial kemasyarakatan tercermin dari bagaimana mereka membangun strategi nafkah (*livelihood strategy*). Dalam konteks ini, kemiskinan (akan) memberikan gambaran organisasi sosial untuk survival yang lebih kompleks

daripada masyarakat yang mapan secara ekonomi. Pilihan *survival strategies* bisa berbasiskan: (1) *spatial*: melakukan migrasi; (2) melakukan diversifikasi lapangan pekerjaan: pola nafkah ganda; (3) *stage of development*: *survival*, *consolidating*, dan *accumulating stage of development*; (4) *division of labor within family resources*: *household allocation strategy*; (5) *individual*: *straddling strategy*. Tercakup dalam fokus kajian Mazhab Bogor adalah krisis pedesaan mendorong gerak penduduk tidak hanya desa-kota dalam satu negara, melainkan desa – kota di lain negara. Dalam hal ini, migrasi orang miskin (internal dan eksternal) sangat berkaitan dengan daya dukung desa (termasuk nasional) yang tidak lagi mampu memberi jaminan kesejahteraan minimum bagi penduduknya. Selanjutnya, Sajogyo (2006) menambahkan revolusi hijau hanya merubah pola pertanian tradisional ke modern, namun tidak membangun pertanian tersebut secara utuh (struktur dan kelembagaan petani).

Teorisasi di atas akan diperhadapkan dengan realitas empiris kemiskinan, gerak penduduk, dan perubahan struktur agraria. Analisis teorisasi diharapkan “memuara” pada gagasan awal pembetulan teori siklus kemiskinan (agraria) yang mengkaji fenomena perubahan struktur agraria, kemiskinan, dan gerak penduduk pedesaan di Jawa Barat.

Kemiskinan dan Pilihan Gerak Penduduk

Kemiskinan dan migrasi adalah dua konsep yang sangat penting dalam memahami kependudukan. Selanjutnya ukuran kesejahteraan dan kegunaan migrasi merupakan variabel yang seharusnya dihubungkan. Dalam hal ini, permasalahan kesejahteraan (dalam hal ini kemiskinan) yang dialami oleh calon migran dan keluarganya mendorong melakukan gerak penduduk sebagai salah satu strategi bertahan hidup dari keluarganya.

Strategi bertahan hidup ini terjadi untuk semua jenis gerak penduduk. Baik yang sifatnya permanen, maupun yang sifatnya non permanen. Baik migrasi internal maupun migrasi

⁹ Sebagai middle range theory

internasional. Dalam migrasi internal, fenomena ini sangat tampak nyata dan terutama pada tipe gerak penduduk sirkulasi dan komutasi. Kedua gerak penduduk ini selalu ada, mulai dari yang sifatnya lintas desa-desa, desa kota, kota-kota, maupun yang sifatnya daerah asal ke negara tujuan migrasi. Menurut Young (1994), migrasi antar desa biasanya terjadi pada kondisi pra industri karena keterbatasan transportasi (jarak jauh). Selanjutnya menurut White dan David (2005), dua dari beberapa faktor penyebabnya adalah pilihan tempat tinggal dan pekerjaan.

Tjiptoherijanto (1996), mengemukakan bahwa meskipun belum ada penelitian khusus tentang peran aktor determinan, terhadap tingkat urbanisasi, namun para demografer yakin bahwa 50% tingkat urbanisasi diakibatkan oleh pertumbuhan alamiah. Migrasi desa-kota adalah 40% dan reklasifikasi wilayah adalah 10%. Berikut adalah jumlah bertambahnya penduduk perkotaan sejak tahun 1971-2010 dan persentase penduduk miskin (Tabel 1).

Angka-angka yang ditunjukkan dengan jumlah penduduk urban (Tabel 1) di atas, pada prinsipnya dapat dikatakan bekerjanya variabel-variabel demografi (fertilitas, mortalitas, migrasi). Perubahan angka-angka tersebut juga relevan dengan apa yang dikemukakan oleh Tjiptoherijanto (1996), khususnya variabel migrasi (desa-kota) relatif signifikan (40%) mempengaruhi tingkat urbanisasi di Indonesia.

Migrasi internasional yang merupakan fenomena yang telah mendunia dan berdampak positif dan negatif. Dampak dari migrasi internasional mencakup dampak positif dan negatif. Beberapa dampak positifnya adalah mengurangi angka pengangguran di Indonesia yang implikasinya selain menambah pendapatan rumah tangga buruh migran tersebut, secara makro juga menjadi aset bagi devisa negara¹⁰. Selanjutnya, beberapa dampak negatifnya adalah adanya sejumlah kasus-kasus kekerasan, penyiksaan, dan pelecehan seksual, baik sebelum berangkat maupun di negara tujuan. Sementara itu, menurut jenis pekerjaan yang banyak tersedia untuk buruh migran perempuan adalah pembantu rumah tangga yang masuk dalam wilayah 3D (*dirty, dangerous, and difficult*).

Salah satu dampak negatifnya adalah memperlihatkan strategi ekonomi perempuan yang menjadi kepala rumah tangga dan menunjukkan adanya persoalan bagi anak-anak yang ditinggal ibunya di desa serta kesejahteraan para lansia (Wahyuni 2000). Kasus lainnya yang juga banyak terjadi adalah, perceraian yang diawali dengan penggunaan remiten oleh suami untuk menikah lagi dan membiayai keluarga barunya.

Relevan dengan dampak positif, dan diperhadapkan pada tantangan dampak negatif serta perubahan budaya, masing-masing keluarga migran pada akhirnya memilih melakukan gerak penduduk-termasuk melakukan migrasi internasional (dimana istri harus meninggalkan suami, anak dan keluarga karena memilih menjadi buruh migran). Pilihan ini juga sangat terkait dengan keragaman potensi antar wilayah merupakan faktor penyebab migrasi di Indonesia. Dan merespon potensi sumberdaya yang ada dan melakukan migrasi diyakini dapat mengatasi kesulitan-kemiskinan. Upaya mengatasi masalah ini disebut "survival strategy" (Ellis 2000; Mazhab Bogor). Hal ini juga relevan dengan apa yang dikemukakan oleh Deere and de Janvry (1979) tentang upaya bertahan hidup rumah tangga. Rumah tangga perlu mengatur empat proses dasar yaitu (1) *home production*, (2) *wage labour production*, (3) *circulation* dan (4) *reproduction-differentiation*. Pada saat

waktu tertentu, rumah tangga memiliki kontrol atas sejumlah alat-alat produksi, seperti bahan baku (tanah, air), sarana kerja (bibit, pupuk, alat pertanian dan mesin) dan tenaga kerja keluarga (pembagian kerja berdasarkan usia dan jenis kelamin) dan melakukan kegiatan produksi bekerja pada tingkat rumah tangga, juga proses sirkulasi. Lebih lanjut, menurut Deere dan de Janvry (1979), proses produksi (ekonomi) dan reproduksi (domestik) rumah tangga, bekerja di bawah pengaruh faktor struktural makro di luar rumah tangga. Individu anggota rumah tangga akan dialokasikan untuk bermigrasi untuk mencari pekerjaan di kota atau daerah pedesaan lain dan dalam situasi yang ekstrim seluruh keluarga bisa pindah secara permanen (Deere dan de Janvry 1979).

Migrasi merupakan bentuk perpindahan penduduk dengan maksud menetap di daerah tujuan, sementara sirkulasi tidak disertai keinginan untuk menetap di lokasi tujuan. Karena selalu bersifat selektif, maka migrasi membawa dampak perubahan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap komposisi demografis, sosial ekonomi suatu penduduk baik di daerah asal maupun daerah tujuan (McFalls 2007). Migrasi antar negara menjadi penting karena mencerminkan ketidaksamaan dalam pembangunan antar negara. Ketidaksamaan ini dapat dicermati sekurangnya dari tujuh hal yakni: (1) perbedaan dalam kemakmuran suatu negara, (2) perbedaan dalam tingkat upah, (3) perbedaan ketersediaan peluang bekerja dan berusaha, (4) perbedaan biaya transport, (5) ketersediaan jaringan sosial dan hubungan kekerabatan, (6) hambatan sosial budaya, dan (7) hambatan politik antar negara.¹¹

Remiten dan Dinamika Kesejahteraan Keluarga

Remiten, selama ini dipahami sebatas ekonomi (uang dan barang) yang mengalir dari negara penerima migran ke negara asal migran. Namun dalam realitanya, transfer yang terjadi tidak hanya persoalan material saja, melainkan juga aspek-aspek mendasar yang lain seperti sosial, politik, dan kebudayaan. Selain remiten berupa uang dan barang yang bernilai ekonomis, remiten dapat juga berupa gagasan atau ide-ide, pengetahuan, pengalaman baru yang diperoleh selama bekerja di kota (Mantra 1995). Menurut Levitt (1996), remiten sosial ditransformasikan melalui migrasi. Remiten sosial dibawa oleh migran ketika pulang/dipertukarkan melalui surat, video atau telepon. Proses aliran remiten melalui jalur formal atau informal dan melalui pertukaran interpersonal.

Remiten sosial adalah ide-ide, perilaku, identitas dan kapital sosial yang mengalir dari negara pengirim ke negara penerima migran (Levitt 1996). Selanjutnya, Levitt (1996) menjelaskan ada tiga tipe hubungan yang terbentuk antara migran dan kebudayaan di negara penerima yaitu:

1. *Pasif Recipients* (penerima pasif): kelompok ini adalah kelompok yang relatif jarang berinteraksi secara aktif dengan kebudayaan dan komunitas negara penerima;
2. *Instrumental Adapter* (adaptasi instrumental): adalah orang-orang yang berinteraksi lebih banyak dengan kegiatan di negara yang didatangi; dan
3. *Purposeful Innovators* (*Inovator bertujuan*): berbeda dengan penerima pasif, kelompok ini adalah kelompok yang agresif untuk menyerap dan menyeleksi hal-hal baru.

Pengkategorian ketiga kelompok di atas, sangat dipengaruhi oleh tingkat interaksi antara imigran dan negara yang mereka

¹¹ Pooley, Coolin G. and Whyte, Ian (eds). *Migrants, Emigrants, and Immigrants A Social History of Migration*. London and New York: Routledge, 1991: 7-10.

¹⁰ TKI sering disebut sebagai pahlawan devisa karena dalam setahun bisa menghasilkan devisa 60 triliun rupiah (2006), informasi dari http://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_Kerja_Indonesia

datangi. Levitt (1996) mengidentifikasi, setidaknya ada empat tipe remiten sosial, yaitu struktur normatif, identitas, sistem perilaku, dan kapital sosial.

Merespon ragam tipe remiten di atas, dalam tulisan ini remiten lebih fokus pada aras mikro atau keluarga, dimana remiten tersebut dapat dimanfaatkan oleh keluarga migran di daerah asal untuk berbagai kebutuhan, tabungan, termasuk untuk membeli aset lahan (sumberdaya agraria lokal). Dalam konteks ini, aksesibilitas yang rendah terhadap sumberdaya agraria lokal (selanjutnya disebut kemiskinan agraria) mendorong calon migran memilih menjadi migran. Dengan demikian akar permasalahannya adalah kemiskinan agraria. Lebih lanjut dapat dianalisis juga bahwa alas akar realitas kemiskinan adalah belum terwujudnya revolusi sosial (revolusi kesejahteraan) yang juga telah dicita-citakan pada Pancasila dan UUD 1945. Dalam hal ini, walaupun ada upaya-upaya reforma agraria, tetapi cenderung “setengah hati”, orientasinya masih kapitalistik atau reforma agraria yang lebih melayani “pemodal”, “pasar”, sehingga dapat disebut sebagai “dilema reforma agraria”.

Arah dan Pola Gerak Penduduk (Permanen dan Non Permanen)

Geertz (1984) pada prinsipnya juga menunjukkan bahwa bila tidak terjadi gerak penduduk maka kondisi kesejahteraan masyarakat sulit berubah. Kondisi kesejahteraan petani yang tidak mengalami perubahan, bahkan berbagi lahan pertanian yang sempit dengan keluarga atau penduduk yang tidak memiliki lahan. Demikian juga dengan hasil penelitian Singarimbun dan Penny (1976) menunjukkan adanya kemiskinan di pedesaan, yang juga mendorong penduduk di Srihardjo melakukan gerak penduduk. Lebih lanjut Tauchid (2009) mengemukakan bahwa agraria (kaum tani) mengutarakan bahwa masalah agraria (kaum tani) adalah masalah penghidupan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Dengan demikian secara implisit ketiganya hendak mengatakan bahwa diperlukan strategi baru untuk *survival* (khususnya bila tidak terjadi gerak penduduk).

Arah migrasi yang dimaksud adalah berhubungan dengan daerah tujuan gerak penduduk. Arah migrasi masyarakat Indonesia pada prinsipnya sangat terkait dengan pola migrasi yang terjadi. Dalam konteks ini arah migrasinya adalah ke daerah atau wilayah dan atau negara yang memiliki sumberdaya yang lebih baik bila dibandingkan dengan daerah asalnya. Studi Kolopaking (2000) di Wargabinangun propinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa penghijrah ke Malaysia sebagai besar dari golongan kekurangan/*wirang*. Dalam konteks berhijrah ke Malaysia, pada dasarnya berkaitan dengan usaha mereka yang tidak beruntung memperbaiki hidupnya. Namun demikian, kondisi saat ini, migrasi (menjadi migran) ada kecenderungan dilakukan oleh golongan perempuan dari lapisan menengah. Dengan demikian arah migrasi (nasional) dan internasional bergerak ke arah daerah yang lebih baik sekaligus berupaya ke arah memperbaiki taraf hidup karena ragam faktor yang menjadikan taraf hidup keluarga migran masih tetap miskin.

Kasus migrasi Indonesia menunjukkan bahwa migrasi antar daerah (dalam hal ini) propinsi merupakan fenomena yang umum. Menurut Wahyuni (2000), peningkatan mobilitas penduduk bukan hanya melibatkan dominasi mobilitas etnis tertentu seperti suku Minangkabau dan Bugis di Indonesia, tetapi hal itu telah meluas kepada etnis suku lain dalam melakukan migrasi yang bukan secara melembaga. Migrasi penduduk sebagai bagian dari dinamika kependudukan di Indonesia lebih erat kaitannya dengan proses pembangunan

yang telah dilakukan. Lebih lanjut Wahyuni (2003) dalam analisa migrasi masuk di Jawa Barat (Jabar), Propinsi Jabar juga menarik pendatang karena merupakan daerah pengembangan industri nasional yang menyediakan lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Meskipun persentase penduduk Jabar yang dilahirkan di propinsi lain relatif kecil, tetapi dibandingkan dengan jumlah penduduk Jabar (30 juta lebih), maka secara absolut jumlah pendatang tersebut sangat besar termasuk di propinsi Banten. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Jabar dan Banten, melainkan juga disejumlah propinsi di Indonesia-misalnya di Yogyakarta, dimana migrasi masuk yang tinggi diikuti dengan migrasi keluar yang tinggi sehingga relatif tidak diikuti dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi¹². Kasus lain yang berpotensi tinggi, khususnya di daerah-daerah perbatasan kabupaten/kota; propinsi, bahkan perbatasan negara (yang diduga tidak teradministrasi dengan baik).

Gerak penduduk yang sifatnya tidak permanen lainnya adalah migrasi internasional, sebagaimana dikemukakan pada bagian pendahuluan, jumlah pelaku migrasi internasional jumlahnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dan kecenderungan yang terjadi dalam dua puluh tahun terakhir adalah pelaku migrasi didominasi oleh perempuan, dengan demikian perempuan lebih *migratory* dibandingkan dengan laki-laki.

Hasil-hasil penelitian menunjukkan peningkatan kesejahteraan setelah melakukan migrasi. Hasil penelitian Murdiyanto (2001) menunjukkan adanya gejala perubahan struktur sosial masyarakat akibat migran sirkuler. Gejala perubahan tersebut antara lain (a) perubahan taraf hidup migran dan keluarganya, (b) perubahan gaya hidup migran dan keluarganya, dan (c) munculnya Paguyuban Migran.

Hasil penelitian Nuralinda (2002) menunjukkan kemiskinan masyarakat sub urban (pinggiran kota) disebabkan oleh faktor alamiah dan struktural antara lain konversi penggunaan lahan, rendahnya pendidikan, kurangnya akses terhadap modal, dan kurangnya jaringan sosial. Untuk itu, strategi yang dijalankan untuk tetap bertahan adalah strategi adaptif, yaitu optimalisasi penggunaan tenaga kerja keluarga, pola nafkah ganda, dan mengembangkan kelembagaan sosial. Petani miskin pinggiran perkotaan melakukan migrasi untuk dapat *survival*. Dalam konteks ini, pada prinsipnya tidak hanya petani miskin perkotaan yang melakukannya, melainkan merupakan fenomena yang umum. Gerak penduduk yang dilakukan dalam konteks ini adalah sifatnya komutasi yang dilakukan oleh para komuter. Hasil penelitian Sumartono (2012) juga menunjukkan hasil yang relatif sama dalam hal perubahan status sosial ekonomi dan budaya dalam rumah tangga migran yang lebih baik dari sebelumnya. Selain ditunjukkan dengan kepemilikan aset dan modal, juga ditunjukkan oleh skor indeks peningkatan ekonomi (IPE) antara sebelum dan sesudah migrasi.

Hasil penelitian (Elizabeth 2007) menunjukkan bahwa remiten bekerja di luar negeri berdampak positif pada upaya diversifikasi usaha rumahtangga di pedesaan (Jabar dan Kalimantan Barat). Menurut Elizabeth (2007), diversifikasi usaha rumahtangga pelaku migran dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga petani. Diversifikasi usaha yang dimaksud adalah sumber pendapatan yang mengarah pada non-farm yang mampu meningkatkan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan *on-farm*, dan *off farm*.

Wulan (2010) berhasil mengidentifikasi tiga bentuk remiten sosial para Buruh Migran Perempuan (BMP) selama bekerja di luar negeri. *Pertama*, berbagai jenis pengetahuan (misalnya

¹² Lihat Wahyuni (2000), propinsi Yogyakarta memiliki kekhasan tersendiri sebagai kota pendidikan.

berbahasa Inggris, Arab, dan Kantonis; mengoperasikan alat-alat modern; naik pesawat; gizi, kesehatan sanitasi, dan kebersihan). *Kedua*, etos kerja disiplin, tepat waktu dan kerja keras, perubahan cara pandang (*mind set*) dalam hal pendidikan anak, kemandirian, pernikahan, relasi gender dalam keluarga. *Ketiga*, terbentuknya jaringan sosial karena keterlibatan beberapa BMP dalam organisasi (baik organisasi advokasi buruh migran, seni budaya, sastra, keagamaan). Hasil analisis Wulan (2010) menyimpulkan bahwa remiten sosial adalah pengetahuan, gagasan, dan kapital sosial yang dimiliki BMP dan dengan pengetahuan tersebut bisa membuat mereka menjadi perempuan yang memiliki kemampuan pemberdayaan, perlindungan, dan melakukan perlawanan terhadap proses komodifikasi. Demikian juga dengan hasil penelitian Zid (2012)¹³ di dua desa (Panyingkiran dan Ciherang) propinsi Jawa Barat menunjukkan alasan yang mendasari rasionalitas migrasi internasional perempuan pedesaan di Jabar adalah motif untuk memperbaiki ekonomi keluarga agar bisa keluar dari kemiskinan di pedesaan.

Kemiskinan dan Perubahan Struktur Agraria

Tiga ketimpangan yang menyangkut sumber-sumber agraria yang memenuhi hajat hidup orang banyak, yaitu (1) ketimpangan dalam hal struktur pemilikan dan penguasaan tanah; (2) ketimpangan dalam hal peruntukkan tanah; dan (3) *incompability* dalam hal persepsi dan konsepsi mengenai agraria. Hasil Sensus Pertanian (ST) Tahun 2003 juga menunjukkan jumlah rumah tangga pertanian (RTP) *gurem* (menguasai lahan kurang dari 0.5 ha) 13.7 RTP yang selanjutnya berdampak pada realitas kemiskinan, khususnya pada RTP *gurem*, juga pada RT tuna kisma, termasuk komunitasnya.

Kemiskinan sebagaimana dikemukakan di atas berhubungan dengan aksesibilitas terhadap sumberdaya agraria. Relevan dengan hal tersebut Sumarti (1999) dalam hasil penelitiannya menunjukkan (1) Persepsi atau ukuran kesejahteraan orang Jawa di pedesaan sangat berkaitan dengan nilai budaya (simbol) yang dipegang dalam struktur sosial, (2) Kesejahteraan bagi masyarakat Jawa merupakan kondisi lahiriah yang ingin dicapai oleh seseorang atau keluarga berdasarkan apa yang dianggap paling berharga dalam hidup orang Jawa, yaitu *wiryō* (derajat atau kedudukan), *arto* (harta benda), dan *winasih* (kepandaian). Dalam hal ini, upaya untuk mencapai kondisi lahiriah harus berlandaskan nilai-nilai budaya Jawa sehingga menghasilkan kebahagiaan hati, yaitu rahayu (secara fisik sehat), slamet (rasa aman), dan tentram (rasa *ayem*). Hasil analisis lebih lanjut menekankan bahwa keluarga tidak sejahtera adalah keluarga yang tidak memiliki satupun apa yang dianggap paling berharga dalam hidup orang Jawa, atau hanya memiliki kewarisan (kepandaian) saja, serta upaya mencapai kondisi lahiriah tidak lagi berlandaskan nilai-nilai budaya Jawa. Sehingga ada kecenderungan keluarga menggunakan ukuran modern kesejahteraan

Mengingat penelitian ini spesifik mengkaji kemiskinan, migrasi, dan perubahan struktur agraria, maka posisi terakhir teorisasi dan fakta empiris khususnya menyangkut struktur agraria perlu dideskripsikan sebelum lebih jauh merumuskan gagasan awal teori sosiologi kemiskinan (agraria) ini. Posisi terkini tentang struktur agraria komunitas petani pekebun di Indonesia yang akan dirumuskan memiliki acuan dasar dari hasil penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dasar dari rencana penelitian ini adalah penelitian KKP3T Tahun 2007 dan 2008; Riset payung IPB tahun 2008; dan Penelitian Hibah Bersaing Dikti-IPB Tahun

2009¹⁴ serta penelitian lain relevan.

Usaha pertanian (tanaman "komersial" perkebunan) yang teknis pengusahaannya dilakukan secara intensif ternyata lahan tidak lagi menjadi faktor produksi tunggal tetapi menjadi salah satu dari dua faktor produksi penting yang saling terkait yaitu lahan dan modal finansial. Hal ini mendorong struktur agraria baru, terutama munculnya "pola hubungan sosial produksi banyak pihak" dan/atau munculnya "pola hubungan sosial produksi dua pihak yang semakin terakumulasi/tersubordinasi. Selanjutnya, struktur agraria komunitas petani berbasis tanaman sawit dan karet dibangun oleh beragam lapisan sosial yang sangat beragam-terstratifikasi (Sitorus *et al.* 2007; 2008).

Struktur agraria lokal pada komunitas petani pekebun (kakao) di Sulawesi Tengah dan Aceh dan di Desa Kerta (Banten) lebih kompleks dibandingkan dengan kondisi di Riau dan di Desa Bojongjuruh (Banten) karena perbedaan basis komoditi yang ditanam (Sihaloho *et al.* 2009). Petani miskin tidak mampu mengusahakan lahan secara produktif¹⁵. Peta kondisi sosio-ekonomi masyarakat (beragam lapisan petani) di Desa Sidajaya (Jabar) relatif masih timpang. Sistem kepemilikan dan penguasaan tanah terdapat di Desa Sidajaya ini adalah bersifat individu (rumah tangga petani) dan sistem pemilikan/penguasaan lahan oleh perkebunan (HGU), dan pola-pola hubungan sosio-agraria yang melembaga adalah (a) sistem *maro* atau bagi hasil; (b) sistem *mertelu*; (c) sistem *ceblokan*; dan (d) sistem grebegan. Demikian juga dengan hasil penelitian Fadjar (2009), transformasi struktur agraria lokal yang terjadi tidak menghasilkan diferensiasi sosial masyarakat agraris yang terpolarisasi tetapi hanya menghasilkan diferensiasi sosial masyarakat agraris yang terstratifikasi disertai dengan semakin timpangnya luas pemilikan sumberdaya agraria lokal.

Hasil penelitian Fadjar (2009) juga menunjukkan bahwa implikasi kapitalisme terhadap praktek moda produksi yang merupakan cara produksi komunitas petani, ternyata tidak membelah komunitas petani menjadi beberapa kelompok yang terpisah akibat perbedaan praktek moda produksi yang mereka jalankan. Masyarakat menjalankan dua moda produksi dengan prinsip moral dan ekonomi secara bersamaan atau bergantian, karena solidaritas organik yang mulai tumbuh meskipun solidaritas mekanik masih tetap dipegang petani (moda produksi "amphibian"). Lebih lanjut Fadjar (2009) menyatakan selain terjadinya diferensiasi sosial masyarakat agraris juga terjadi diferensiasi kesejahteraan dalam komunitas petani. Problema kesejahteraan akan terjadi pada saat sumberdaya agraria yang ada pada komunitas petani tidak dapat memberikan penghasilan minimal (setara garis kemiskinan) bagi anggota komunitas dan bersamaan dengan itu tidak tersedia sumber penghasilan alternatif (non-pertanian).

Penelitian berikutnya adalah penelitian Dharmawan *et al.* (2011) di Desa Sumber Mulia, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian Dharmawan *et al.* (2011) menunjukkan adanya ketimpangan struktur agraria lokal, kondisi kemiskinan, dan kerusakan ekologi merupakan ancaman yang sangat krusial. Pada awal mengikuti program Transmigrasi (1979), rata-rata luas kepemilikan lahan (termasuk kategori lahan gambut, khususnya lahan garapan) adalah 2.25 ha dengan rincian 2 ha lahan garapan dan 0.25 ha untuk pemukiman serta pekarangan. Dengan demikian, struktur agraria merupakan *trans-based agrarian structure*. Selanjutnya rata-rata pemilikan lahan

14 Dalam penelitian dimaksud, penulis terlibat dalam Tim Peneliti. Semua kegiatan penelitian ini di bawah Payung Riset Departemen Pertanian dan Institut Pertanian Bogor.

15 Dalam hal ini reforma agraria harus menjadi landasan tolak melalui pemberian akses sumberdaya agraria kepada para pekebun dan revitalisasi perkebunan sebagai supporting system yang memberikan akses kepada para pekebun.

13 Makalah Semiar Pascasarjana IPB, Migrasi Tenaga Kerja Internasional Perempuan dan Penguasaan Lahan Pedesaan: Kasus Tipe Komunitas Desa Sawah di Jawa Barat. Dipresentasikan, Senin 5 Maret 2012.

garapan pada tahun 2010 adalah sebesar 1.5 ha dengan komposisi 0.5-1 ha sekitar 30%, 1 – 1.5 ha sekitar 60% dan 10% sisanya memiliki lahan lebih dari 1.5 ha. Kondisi ini relatif tidak mengalami perbedaan sejak tahun 2005. Tetapi, bila dibandingkan dengan kondisi tahun 1979, kondisi ini sangat berbeda, dimana yang terjadi adalah diferensiasi (arah perubahan struktur agraria=menunjukkan ketimpangan struktur agraria lokal).

Hasil penelitian Dharmawan *et al.* (2011), sekalipun secara sosial (kecukupan pangan dan sandang-papan) terpenuhi, tetapi program transmigrasi tidak menjadikan masyarakat transmigran melakukan "akuisisi kesejahteraan" kehidupan yang lebih baik. Boleh dikatakan bahwa dengan demikian pencapaian kesejahteraan ekonomi yang progressif (mengikuti jaman) tidak tercapai (tidak aman secara ekonomi = *in the long run, economically unsafe*) karena kebutuhan ekonomi yang berkembang, tidak dapat diikuti oleh program transmigrasi. Artinya, harus ada solusi selain transmigrasi bagi para petani pasca transmigrasi, bila mereka harus memenuhi kebutuhan ekonomi yang berkembang. Dalam hal ini *economic safety valve* yang dijamin oleh program transmigrasi hanya akan aman bila *landuse* kawasan sawah (mau tak mau) dilakukan ke arah *industrialisasi pertanian* seperti transformasi sawah menjadi perkebunan sawit. Tetapi (harga sosial-ekologisnya) bila *landuse* terjadi, maka ekosistem kawasan mengalami *destabilisasi ekosistem* (pengeringan kawasan dan rentan kebakaran sehingga keamanan ekologis kawasan gambut terancam. Ancaman lain, bila perekonomian *perkebunan-industrial* berkembang, maka kompetisi antara perkebunan dan pangan akan berlangsung ketat, yang berujung hilangnya kawasan pangan dan *food insecurity*. Dalam hal ini gerak penduduk (melalui program transmigrasi pada generasi 1) pada akhirnya menghasilkan kemiskinan baru (khususnya generasi 2 dan generasi 3).

Hasil penelitian Yusuf (2011) menunjukkan bahwa marginalisasi petani terjadi karena masuknya perkebunan dan kehutanan. Marginalisasi petani karena hubungan antara petani dan bandar saling menjaga hubungan yang tidak setara (pembentukan dan penumpukan=akumulasi surplus). Kemiskinan petani juga dapat diakibatkan oleh gerakan petani yang relatif involutif. Hasil penelitian Hartoyo (2010) menunjukkan dalam gerakan petani terjadi stagnasi karena dalam proses penguatan gerakan diwarnai dengan disorientasi para pelaku elit aktor yang akibat negatifnya tidak dapat dikontrol. Lebih lanjut (Hidayat 2011) menekankan aspek kelembagaan. Kelembagaan makin 'meluruh' akibat politik tata kelola yang konvensional. Dalam kondisi tersebut, diperlukan (menjadi sangat urgen) penguatan kelembagaan lokal khususnya bila diperhadapkan dengan supra lokal. Politik tata kelola agraria konvensional menjadi landasan perlunya politik agraria transformatif. Dalam hal ini politik agraria konvensional dipandang sebagai penyebab 'peluruhan kelembagaan lokal'. Peluruhan kelembagaan lokal juga diakibatkan oleh pengorganisasian pada aras lembaga (dalam hal ini pengorganisasian kelompok tani di daerah aliran sungai/DAS).

Posisi terkini hasil penelitian yang relevan dengan kemiskinan, migrasi, dan perubahan struktur agraria adalah penelitian Zid (2012). Dalam hubungannya dengan agraria, hasil penelitian Zid (2012) menyatakan peningkatan kesejahteraan untuk memperbaiki ekonomi keluarga agar bisa keluar dari kemiskinan di pedesaan ditunjukkan dengan investasi keluarga migran dalam membeli lahan. Investasi di dua lokasi penelitian khususnya dalam empat tahun terakhir (2007-2010) mencapai masing-masing 45 (transaksi di Panyingkiran) dan 36 (transaksi di Cihayang).

Peningkatan jumlah (maraknya jual beli lahan) di dua lokasi penelitian Zid (2012) secara sosiologis menandakan telah terjadi peningkatan keluarga yang mengalami mobilitas sosial dimana keluarga yang berasal dari lapisan terbawah "jelema melarat" di pedesaan dengan cara menguasai lahan bisa mengalami kenaikan status sosialnya. Menariknya, mobilitas tersebut dimotori oleh perempuan migran, yang sebelumnya termasuk golongan yang tidak diperhitungkan. Upaya mengakumulasi modal ini dapat disebut sebagai "strategi nafkah baru" untuk keberlanjutan kesejahteraan yang lebih baik. Twigg (2007) menyebutnya sebagai strategi nafkah yang mengoptimalkan aset sosial, ekonomi, sumberdaya alam, keterampilan, dan teknologi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Dalam hal ini relatif berbeda dengan Scott (1981) yang melakukan strategi nafkah (migrasi) untuk etika subsistensi.

Gagasan Awal: Persistensi Kemiskinan Agraria

Pilihan menjadi pelaku migrasi secara khusus, pada prinsipnya juga berhubungan dengan dinamika kependudukan di negara tujuan, misalnya fertilitas rendah. Akibatnya, tenaga kerja yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi dari sumber daya manusia dari negaranya (internal), sehingga harus mendatangkan tenaga kerja dari luar (misalnya Indonesia). Kehadiran TKI di negara tujuan menjadi realitas baru yaitu meningkatnya migrasi masuk. Dengan demikian, dalam hubungan antara dua negara (asal dan tujuan migrasi internasional) berakibat pada dinamika kependudukan, termasuk kegunaan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Jumlah TKI yang sifatnya dinamis karena tergantung kebijakan pemerintah (misalnya dengan moratorium) pada akhirnya juga menghasilkan realitas dinamika kependudukan, baik bagi negara asal (Indonesia) maupun bagi negara-negara tujuan.

Realitas peningkatan kesejahteraan¹⁶ melalui remiten di daerah asal pada pelaku migrasi pada akhirnya juga berakibat pada dinamika kependudukan, khususnya keluarga pelaku. Salah satu faktanya adalah peningkatan kesejahteraan keluarga akibat kiriman uang dari TKI yang bekerja. Kiriman uang tersebut digunakan untuk memenuhi beragam kebutuhan, tabungan, termasuk untuk membeli aset lahan (sumberdaya agraria lokal). Selanjutnya, dapat meningkatkan akses terhadap sumber agraria. Misalnya, dulu adalah keluarga pelaku migrasi adalah tuna kisma¹⁷, saat ini menjadi pemilik lahan dan sangat berpeluang menjadi pemilik lahan (kategori lapisan atas berdasarkan ukuran lokal/struktur agraria lokal). Selain remiten ekonomi, remiten sosial dapat menambah motivasi baru bagi pelaku migran (khususnya yang tidak berangkat lagi menjadi migran) juga dapat berguna dalam mewujudkan pembangunan desa (misalnya menjadi kepala desa/lurah) maupun menyiapkan SDM masa depan (misalnya menjadi pengajar) dan ragam peran lainnya di masyarakat¹⁸.

Gagasan di atas dapat dirumuskan dengan rumusan awal-proposisi dalam penelitian ini. Rumusan awal-proposisi tersebut adalah:

1. Perubahan struktur agraria menyebabkan perubahan

16 Merupakan tujuan yang diharapkan sebelum memutuskan menjadi pelaku migrasi internasional

17 Proses munculnya tuna kisma salah satu diantaranya makin banyaknya jumlah penduduk di suatu wilayah. Dalam hal ini rasio manusia lahan makin tinggi. Faktor lainnya adalah aksesibilitas yang rendah, kondisi kemiskinan, dan sistem pewarisan tanah yang relatif sempit karena jumlah anak yang menerima warisan relatif banyak (> 2 orang), sementara lahan yang dimiliki relatif sempit (<0.5 ha). Hasil Sensus Pertanian tahun 2003, jumlah rumah tangga gurem/RTP (<0.5 ha) adalah 13.7 juta RTP atau meningkat 2.6 persen per tahun dari 10.8 RTP di tahun 1993. Dalam tulisan ini secara khusus kemiskinan sangat berhubungan dengan aksesibilitas terhadap sumberdaya agraria.

18 Hasil penelitian Wulan (2010). Dalam konteks ini, disadari sepenuhnya ada sejumlah dampak negatif dari remiten-termasuk pilihan migrasi.

aksesibilitas terhadap sumberdaya agraria

2. Kemiskinan di pedesaan masih ditentukan aksesibilitas terhadap sumberdaya agraria yang sangat rendah.
3. Tingkat aksesibilitas yang rendah (miskin) menjadi salah satu faktor pilihan migrasi ke luar desa (internal maupun internasional) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan (sebagai strategi nafkah rumah tangga).
4. Remiten dan hasil kiriman uang atau gaji dengan bekerja di luar desa dapat memenuhi kebutuhan hidup (survival) bahkan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehingga pelaku migrasi tetap miskin (tradisi Marxian).
5. Remiten dan hasil kiriman uang atau gaji dengan bekerja di luar desa dapat memenuhi kebutuhan hidup (survival) bahkan mampu mengakumulasi asset dan modal (khususnya sumberdaya agraria) sehingga pelaku migrasi dapat keluar dari kemiskinan atau sejahtera (tradisi non-Marxian).

Dalam hubungannya dengan persistensi kemiskinan agraria ini, tradisi Marxian, maka aksesibilitas terhadap sumberdaya sangat menentukan kemiskinan. Dasar argumentasinya adalah, apabila ada pelaku migrasi atau keluarganya yang mampu mengakses sumberdaya (agraria) dalam menambah asset dan modal, maka akan ada pihak lain (misalnya petani gurem atau petani lapisan menengah, bahkan lapisan atas) yang kehilangan lahan (melepas atau menjual lahannya). Dalam konteks dinamika pola-pola hubungan agraria (sosio-agraria) yang terjadi maka persistensi kemiskinan agraria relevan khususnya dalam tinjauan sosiologi pedesaan. Dengan demikian, gagasan awal persistensi kemiskinan agraria dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dirumuskan dengan baik.

Struktur agraria yang merata akan memberikan akses yang relatif sama kepada seluruh masyarakat untuk menguasai dan mengusahakan lahan. Sementara dipihak lain, adanya struktur agraria yang timpang akan memberikan akses sangat terbuka bagi "lapisan minoritas" untuk menguasai dan mengusahakan lahan namun relatif tertutup bagi "lapisan mayoritas" untuk menguasai dan mengusahakan lahan. Oleh sebab itu, sebagaimana dikemukakan Soemardjan (1980) ketimpangan distribusi penguasaan lahan menjadi sumber utama kemiskinan struktural masyarakat. Bahkan menurut Hayami dan Kikuchi (1987) jika ekonomi pedesaan (termasuk struktur agraria) mengarah pada polarisasi dikhawatirkan pertentangan kelas akan meningkat dan stabilitas terganggu sehingga usaha pembangunan jangka panjang menjadi terhambat.

Menurut Sajogyo (2002), tentang pengalaman pada modernisasi pertanian tanaman pangan dalam program revolusi hijau, ternyata program-program modernisasi hanya memperbaiki nasib petani di lapisan atas desa sedangkan petani gurem dan buruh tani tidak tersentuh. Petani gurem dan buruh tani masih tetap tertinggal, tidak terangkat arus pembangunan. Kondisi yang demikian dapat juga terjadi pada program modernisasi yang ditujukan bagi petani pekebun.

Prinsip pembangunan merupakan proses ke arah yang lebih baik. Namun, pembangunan tersebut, tidak selalu menghasilkan dampak positif saja melainkan dampak negatif juga. Baik negara maju maupun negara berkembang masih terus-menerus mengimplementasikan pembangunan. Pembangunan yang dilakukan negara-negara berkembang secara umum merupakan suatu proses kegiatan yang direncanakan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial dan modernisasi bangsa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan rakyat (Suryono 2001). Pembangunan adalah sebagai proses yang memungkinkan anggota masyarakat meningkatkan kapasitas personal dan

institusional dalam memobilisasi dan mengelola sumberdaya untuk menghasilkan perbaikan kualitas yang sesuai dengan aspirasi mereka sendiri, berkelanjutan, adil, dan merata (Korten 1990).

Pemerintah dan beragam pihak lainnya, khususnya dalam konteks program pembangunan "bermuara" dan sejatinya bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata. Dalam konteks tulisan ini, realitas utama yang dianalisa lebih lanjut adalah kemiskinan yang merupakan warisan permasalahan maupun dampak dari program pembangunan. Relevan dengan realitas kemiskinan yang terjadi jauh sebelum Indonesia merdeka, mendorong Pemerintah tetap mengutamakan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Upaya ini tidak hanya di pusat tetapi juga di daerah oleh Pemerintah Daerah, termasuk dalam mencapai tujuan otonomi daerah.

Dinamika kependudukan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan ekonomi terutama industri dan pertanian. Proses pembangunan di Indonesia telah mendorong terjadinya perubahan kependudukan baik dari segi struktur penduduk, struktur keluarga, dan pendapatan keluarga. Faktor penyebabnya adalah implementasi pembangunan ekonomi lebih menitik beratkan kepada pembangunan industri di perkotaan (bias urban, bias Jawa). Juga didukung fakta, sejak tahun 1931 sampai tahun 2010 (hasil SP), jumlah penduduk di Jawa tidak kurang dari 57 persen. Hal ini masih sangat terkait dengan penyediaan lapangan pekerjaan di Jawa.

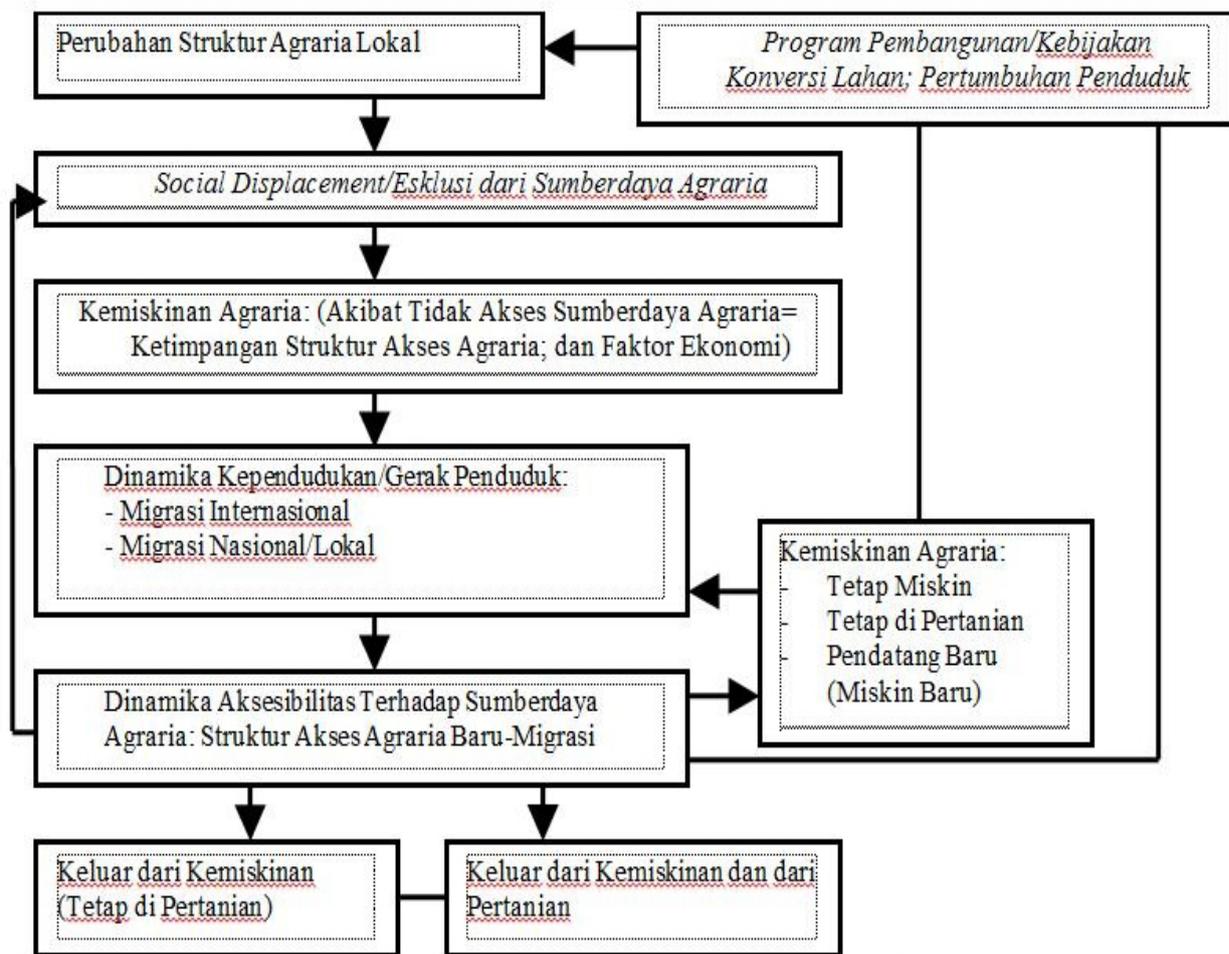
Hasil analisis kependudukan di Indonesia, menunjukkan bahwa penyediaan lapangan pekerjaan yang mencukupi dapat mengatasi masalah pengangguran (biasanya berpendidikan rendah, kurang terampil) dan menurunkan jumlah TKI yang bekerja di luar negeri. Selain itu, dipandang penting diimplementasikan dengan lebih baik kebijakan pembangunan (kependudukan) yang berkaitan dengan fasilitasi TKI yang bekerja sehingga tidak terkesan sebatas keinginan mengurangi pengangguran dan memperoleh pendapatan nasional, peningkatan sumberdaya manusia wanita (meningkatkan angka partisipasi wanita dibidang pendidikan-misal melalui pemberian beasiswa), dan Program Keluarga Berencana, serta program lainnya yang relevan dengan perkiraan/proyeksi penduduk ke depan.

Tulisan ini, sebagaimana telah dikemukakan di atas menggunakan pendekatan materialistis dari Marxian yang berupaya menjelaskan ciri-ciri dasar kehidupan masyarakat dalam hubungannya dengan praktis-material eksistensi manusia itu sendiri. Dalam konteks tulisan ini adalah ketimpangan dan ketidakaksesan keluarga migran terhadap sumberdaya agraria (rata-rata pemilikan lahan di Indonesia <0.5 ha per rumah tangga pertanian (RTP); dan ukuran keluarga di wilayah pedesaan relatif lebih tinggi dibandingkan perkotaan sebagai akar penyebab kemiskinan (ketimpangan struktur agraria lokal)¹⁹ keluarga migran, hingga pada akhirnya memilih melakukan migrasi yang bertujuan untuk strategi rumah tangga (Massey 1993) dan sebagai "survival strategy" (Ellis (2000)²⁰; Dharmawan (2001); Ellis dan Freeman (2005); dan Haas (2008)).

Masyarakat miskin pedesaan pada akhirnya memilih menjadi pelaku migran dalam upaya mengatasi sejumlah kesulitan ekonomi (mengatasi masalah kemiskinan) yang dihadapinya. Dalam gagasan ini, strategi nafkah (Mazhab Bogor) yang sebelumnya dilakukan

19 Dalam aksesibilitas terhadap sumberdaya agraria, maka ketidakaksesan terhadap sumberdaya agraria, terutama bagi RTP tuna kisma menjadi akar penyebab kemiskinan bagi RTP petani (buruh tani).

20 Selain melakukan migrasi, empat upaya lain yang dilakukan menurut Ellis (2000) adalah (1) meningkatkan produktivitas lahan melalui intensifikasi-ekstensifikasi lahan pertanian; (2) pembagian tugas untuk mencari nafkah; (3) menjalin kerjasama dengan komunitas; dan (4) menjalin hubungan patron-klien.



Keterangan:

— : berhubungan → : mempengaruhi ↔ : saling mempengaruhi

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Perubahan Struktur Agraria, Kemiskinan, dan Gerak Penduduk

(misalnya menjadi “buruh serabutan”-mengerjakan apa saja), dipandang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup, terlebih lagi untuk keluar dari “perangkap kemiskinan” yang dialami keluarga migran. Sehingga pilihan rasionalnya adalah melakukan gerak penduduk (permanen maupun non permanen-termasuk migrasi internasional). Strategi gerak penduduk (khususnya migrasi) dilakukan sekaligus “mengubah kultur lama” (suami pencari nafkah utama dan istri urusan domestik) ke arah istri menjadi “pencari nafkah utama” dan suami untuk urusan domestik).

Tahapan pilihan menjadi pelaku migrasi (khususnya migrasi internasional) juga berkaitan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja untuk perempuan. Dalam konteks ini, lebih didasarkan pada prinsip strategi bertahan hidup, mengatasi kesulitan, dan berharap dengan pilihan tersebut “keluar” dari kemiskinan. Aspek kependudukan yang ikut mendinamisasi proses dan pilihan menjadi pelaku migrasi oleh perempuan adalah (1) “gagalnya” program pembangunan nasional dan daerah; (2) dominasi pemodal lokal dan asing (kapitalis) atas sumber-sumber agraria lokal yang akhirnya menjadikan masyarakat miskin makin tidak akses; (3) situasi kemiskinan yang dihadapi keluarga (sosiologi materiliasime dan strategi nafkah RTP); (4) kebijakan kependudukan nasional, dunia, dan khususnya negara tujuan (yang memberikan perijinan dan menerima migran-butuh TK migran); (5) kependudukan di aras nasional, lokal, termasuk keluarga (fertilitas²¹, mortalitas, migrasi

21 Di aras keluarga, ukuran keluarga RTP/RT miskin mendorong upaya strategi

masuk, dan migrasi keluar) (6) Respon terhadap peluang (dipandang pilihan rasional) menjadi pelaku migran (sosial, ekonomi, dan budaya); dan (7) Efektifitas perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) dan “humas-humas” menjadi migran. Relevan dengan teori jaringan sosial (modal sosial)-Massey *et al.*(1993).

Pelaku migrasi yang telah mengambil keputusan dan berangkat menjadi migran pada akhirnya berkontribusi secara nasional (devisa negara) di aras makro dan terlebih di aras mikro (keluarga inti) pelaku migran-berupa remiten. Hasil remiten (khususnya ekonomi-uang) pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan bahkan mampu mengakumulasi *asset* (misal lahan dan rumah) untuk dijadikan modal bahkan ke arah perubahan struktur agraria lokal²². Hasilnya dari beberapa penelitian menunjukkan peningkatan kesejahteraan keluarga pelaku migrasi. Perubahan kesejahteraan masyarakat miskin ini menjadi makin baik pada akhirnya mendinamisasi masyarakat pedesaan misalnya mobilitas sosial vertikal naik, termasuk upaya-upaya untuk melanjutkan kontrak menjadi pelaku migran, mendorong bertahan hidup dengan menjadi pelaku migrasi.

22 Konsep struktur agraria (SA) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pola-pola hubungan sosial yang terkait dengan lahan, baik berupa struktur penguasaan, struktur perusahaan, dan kemudian diikuti oleh struktur distribusi hasil pengelolaan sumber-sumber agraria. Salah satu tujuan program reforma agraria adalah penataan SA agar tidak timpang. SA yang baik adalah pembagian tanah yang adil, jaminan yang mantap dalam hubungan dengan hak guna atau hak sewa dan pajak atau sewa yang adil (lihat Pujiwati, Sosiologi Pembangunan. Fakultas Pascasarjana IKIP Jakarta bekerjasama dengan BKKBN Jakarta. 1985)

anggota keluarga dan komunitas menjadi pelaku migran (teori penyebab kumulatif, proposisi kemiskinan-agraria, proposisi kemiskinan-migrasi). Secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 1.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, tiga hipotesis pengarah (sebagai gagasan awal) yang akan dijawab melalui penelitian²³ adalah (1) perubahan struktur agraria mempengaruhi kondisi kemiskinan; (2) kemiskinan (agraria) mempengaruhi laju gerak penduduk; (3) gerak penduduk (menghasilkan remiten) mempengaruhi perubahan struktur agraria²⁴, dan (3) perubahan struktur agraria menghasilkan kemiskinan baru. Ragam implikasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria (kondisi kemiskinan dan pilihan gerak penduduk-migrasi internasional) berimplikasi pada perubahan struktur agraria dan selanjutnya menghasilkan kemiskinan baru dan golongan kelas baru. Dalam konteks ini, gagasannya adalah kemiskinan (agraria) menghasilkan kemiskinan (agraria) baru. Selain pembentukan teori sosiologi kemiskinan (agraria) berperspektif kependudukan dan sosiologi pedesaan (sebagai kebaruan atau *novelty* dari kajian ini), juga sangat berpeluang membangun teori (minimal proposisi) persistensi kemiskinan (agraria) dan persistensi kemiskinan (migrasi) di pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

Ananta, A. dan Evi NA. 1994. Projection of Indonesia Population and Labor Force 1995-2025. Demographic Institute. Faculty of Economic. University of Indonesia. Jakarta.

Boeke, J.H. 1953. Memperkenalkan Teori Ekonomi Ganda. Dalam Sajogyo (penyunting). 1982. Bunga Rampai Perekonomian Desa. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Deere, D.J. 1979. A Conceptual Framework for the Empirical Analysis of Peasant. American Journal of Agricultural Economic, vol.61, no.4. Amerika Serikat.

Dharmawan, A.H. *et al.* 2011. Strategi Adaptasi Sosial-Ekonomi Dan Kelembagaan Rumahtangga Petani Dalam Merespons Perubahan Iklim: Studi Pada Beberapa Sistem Pertanian Lahan Gambut. Kerjasama Deptan RI dan LPPM IPB. Laporan Penelitian Tidak Dipublikasikan. Bogor.

Dharmawan, A.H. 2001. Farm Household Livelihood Strategies and Socio-economic Changes in Rural Indonesia. Wissenschaftsverlag Vauk KG. Gottingen.

Elizabeth, R. 2007. Remitans Bekerja Dari Luar Negeri dan Diversifikasi Usaha Rumahtangga di Pedesaan (Survai: Empat Desa di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Pontianak). Thesis Pascasarjana IPB. Tidak Dipublikasikan. Bogor.

Ellis, F. 2000. Rural Livelihood and Diversity in Developing Countries. Oxford University Press.

23 Pilihan paradigma metodologi penelitian adalah konstruktivisme dan pilihan paradigma teori yang dipilih adalah tradisi rasional/utilitarian. Menurut Hardiman (2003), berdasarkan paradigma konstruktivisme ini, peneliti dapat memotret realitas sosial baik obyektif (di luar diri) tineliti, maupun subyektif (dalam diri) tineliti. Lokasi penelitian adalah di Desa Warga Binangun, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat. Salah satu dasar utama penentuan lokasi (khususnya pada aras desa) adalah sudah ada studi awal atau studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa masyarakat desa adalah pelaku migrasi baik internal maupun eksternal. Demikian juga dengan jumlah TKI dan tenaga kerja wanita (TKW) dan penduduk miskin yang relatif tinggi (62%). Dasar pertimbangan lain adalah merupakan desa yang termasuk tipologi persawahan. Salah satu indikatornya adalah sumber matapencarian utama adalah pertanian, khususnya petani tanaman padi sawah (Data Podes 2011, dan Data Kemiskinan Tahun 2012)

24 Sifatnya menambah dan atau mengurangi kemiskinan akses terhadap sumberdaya agraria lokal

Ellis, F. dan Freeman, HA. 2005. Rural Livelihoods and Poverty Reduction. Routledge. London and New York.

Geertz, C. 1976. Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia. Bhratara K.A. Jakarta.

Giddens. 2009. Problematika Utama dalam Teori Sosial Aksi, Struktur dan Kontradiksi dalam Analisis Sosial. Dariyanto. Penerjemah. Terjemahan dari Central Problems in Social Theory. Pustaka Pelajar Yogyakarta. Yogyakarta.

Haas, D.H. 2008. Migration and development: A theoretical perspective. Working papers. International Migration Institute. James Martin 21st Century School. University of Oxford.

Hardiman F.B. 2003. Melampaui Batas Positivisme dan Modernitas. Kanisius. Yogyakarta.

Hartoyo. 2010. Involusi Gerakan Agraria dan Nasib Petani: Studi Tentang Dinamika Gerakan Petani di Provinsi Lampung. Bogor. Disertasi. Tidak Dipublikasikan. Bogor.

Hidayat. 2011. Politik Agraria Transformatif: Studi Peluruhan Kelembagaan Lokal dan Kegagalan Politik Tata Kelola Agraria Pada Komunitas Petani di DAS Cidanau Kabupaten Serang Provinsi Banten. Bogor. Disertasi. Tidak Dipublikasikan. Bogor.

Kolopaking, L.M. 2000. Penghijrahan Buruh Ke Malaysia dari Sisi Pembangunan Daerah Asal di Jawa. Mimbar Sosek. Jurnal Sosial-Ekonomi Pertanian. Volume 13 Nomor 1. April. Bogor.

Korten, D.C. 1990. Pembangunan yang Memihak Rakyat, Kupan tentang Teori dan Metode Pembangunan. LSP. Jakarta.

Lee, E.S. 1984. Suatu Teori Migrasi. (diterjemahkan dari bahasa Inggris oleh Hans Daeng). PPK-UGM. 24 hal. (Judul asli A theory of migration. Dalam: Demography 3(1). Tahun 1996. Hal. 47-57.) Yogyakarta:

Levitt, P. 1996 Social Remittances: A Conceptual Tool for Understanding Migration and Development, Working Paper Series Number 96.04.

Mantra, I.B. 2000. Demografi Umum. Edisi ke-2. Pustaka Pelajar. 293 hal. Yogyakarta.

Massey, D.S, *et al.* 1993. Theories of International Migration: A Review and Appraisal, in Population and Development Review, Vol. 19, No. 3, September 1993, pp. 431-466).

McFalls, J. J. 2007. Maret. Population. A lively introduction. Edisi ke-5. [Internet]. [diunduh 3 Juni 2012]. Population Bulletin 62(1). Dapat diunduh dari <http://www.prb.org/pdf07/62.1livelyintroduction.pdf>.

Murdiyanto, E. 2001. Remitan Migran Sirkuler dan Gejala Perubahan Struktur Sosial di Pedesaan Jawa.

Nasution, Z. Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan "Lelang Lebak Lebung" dan Kemiskinan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan). Disertasi. Tidak Dipublikasikan. Bogor.

Nurmalinda. 2002. Petani Miskin di Pinggiran Perkotaan dan Strategi Bertahan Hidup Rumah Tangga (Studi Kasus Petani Lahan Tidur di Kabupaten Bekasi). Bogor. Tesis. Tidak Dipublikasikan.

Pelzer, K.J. 1982. Planters against Peasant: The Agrarian Struggle in East Sumatra, 1947-1958. The Hauge: Martinus Nijhoff.

Rusli, S. 2012. Pengantar Ilmu Kependudukan. Edisi Revisi. LP3ES. Sajogyo. 2006. Ekososiologi: Deideologisasi Teori, Restrukturasi dan Pendekatan Sebagai Kasus Uji.) Yogyakarta. Cinderalas Pustaka Rakyat Cerdas. Sains dan Yayasan Bina Desa Sadajiwa. Yogyakarta.

Scott, J.C. 1981. Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan

- Subsistensi di Asia Tenggara. Basari H. Penerjemah. LP3ES. Terjemahan dari: *The Moral Economy of Peasant. Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. Jakarta.
- Sihaloho, M, *et al.* 2007. *Konversi Lahan dan Perubahan Struktur Agraria*. Bogor. *Jurnal Sodality*, Edisi 1 Tahun 2007. Bogor.
- Sihaloho, M, *et al.* 2009. *Perubahan Struktur Agraria dan Diferensiasi Kesejahteraan Petani*. Bogor. *Jurnal Sodality*, Edisi 1 Tahun 2009. Bogor.
- Sihaloho, M, *et al.* 2010. *Reforma Agraria dan Revitalisasi Pertanian Di Indonesia: Studi Kasus Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Jawa Barat*. Bogor. *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia*. April 2010. Volume 03. No. 03. Bogor.
- Singarimbun, M. dan D.H. Penny. 1976. *Penduduk dan Kemiskinan: Kasus Srihardjo di Pedesaan Jawa..* Bhratara Karya Aksara. Jakarta
- Sitorus, M.T.F, *et al.* 2008. *Perubahan Struktur Agraria dan Diferensiasi Kesejahteraan Petani*. Laporan Penelitian KKP3PT Tahun I. Kerjasama LRPI dan LPPM-IPB. Bogor. Tidak Diterbitkan. Bogor.
- Sitorus, M.T.F, *et al.* 2007. *Perubahan Struktur Agraria dan Diferensiasi Kesejahteraan Petani*. Laporan Penelitian KKP3PT Tahun I. Kerjasama LRPI dan LPPM-IPB. Bogor. Tidak Diterbitkan. Bogor.
- Sumarti, T. 1999. *Persepsi Kesejahteraan dan Tindakan Kolektif Orang Jawa dalam Kaitannya dengan Gerakan Masyarakat dalam Pembangunan Keluarga Sejahtera di Pedesaan*. Disertasi. Tidak Dipublikasikan. Bogor.
- Sumartono. 2012. *Proses Pengambilan Keputusan Migrasi dan Adaptasi Migran Sirkuler Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pamulang*. Tidak Dipublikasikan. Kota Tangerang Selatan. Tesis.
- Suryono, A. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. UM-Press. Malang.
- Tauchid, M. 2009. *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. STPN Press. Yogyakarta.
- Tjiptoherijanto, P. 1966. *Problems of Large Cities: With Reference the City of Jakarta*. Publikasi FEUI. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Twigg, J. 2007. *Sustainable Livelihoods Approaches*. Provention Consortium. Switzerland.
- Wahyuni, E.S. 2000. *The Impact of Migration Upon Family Structure and Functioning in Java*, Thesis Submitted in Fulfillment of requirements the Doctor of Philosophy Degree in Population and Human Resources, Department of Geography The University of Adelaide Australia.
- Wahyuni, E.S. 2003. *Mobilitas Penduduk dan Otonomi Daerah*. *Mimbar Sosek*. *Jurnal Sosial-Ekonomi Pertanian*. Bogor.
- White, M.J. dan David P.L. 2005. *Internal Migration*. In *Handbooks of Population: Handbooks of Sociology and Social Research*. Poston DL and Miclin M. (Edited). America. Kluwer Academic/Plenum Publisher.
- Wulan, T.R. 2010. *Pengetahuan dan Kekuasaan: Penguatan Remiten Sosial Sebagai Strategi Pemberdayaan Buruh Migran Perempuan*. Disertasi. Tidak Dipublikasikan. Bogor.
- Yin, R.K. 004. *Studi Kasus: Desain dan Metoda*. PT Raja Grafiti Persada. Jakarta.
- Young, E. 1994. *Internal Migration*. Lucas D, Meyer P. Editors. In *Beginning population studies*. Edisi ke-2. Canberra [AU]: National Center for Development Studies - ANU. 199 hal.
- Yusuf, M. 2011. *Situasi Kemiskinan dan Proses Marginalisasi Petani Dataran Tinggi Garut (Studi Kasus Komunitas Petani di Dua Dataran Tinggi Garut*. Tesis. Tidak Dipublikasikan. Bogor.
- Zid, M. 2012. *Migrasi Internasional, Penguasaan Lahan, dan Kesetaraan Gender: Kajian di Komunitas Desa Sawah Jawa Barat*. Disertasi. Tidak Dipublikasikan. Bogor.